

Dampak Sosial Ekonomi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kabupaten Pandeglang

Natta Sanjaya¹, Sigid Widyantoro², Ghaziah Nurika Akhni³, Winda Kurnia Dewi⁴,
Soffie Qurrota A'yun⁵

^{1,2,3,4,5}Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Tidar, Magelang

¹nattasanjaya@untidar.ac.id, ²sigid.widyantoro@untidar.ac.id, ³nurika.akhni@untidar.ac.id,

Submitted: 10/12/2024; Revised: 06/01/2025; Published: 31/01/2025

DOI: <https://doi.org/10.61332/ijpa.v8i1.254>

Abstract

Pandeglang Regency has 201,16 hectares of slum areas spread across 37 locations in 13 sub-districts. The Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) program in Pandeglang Regency still has several problems in its implementation, namely the lack of active community involvement, the location of the program target is not evenly distributed, the program is not oriented to the poor community at large, the mismatch of the program rolled out with the conditions needed by the community, the utilization and maintenance of program results are not carried out optimally. The purpose of this research is to find out what are the social and economic impacts of the KOTAKU program in Pandeglang Regency. The research method used is a qualitative research method with a descriptive approach. The results showed that the social impact of the KOTAKU program is to increase active participation and awareness in the community to work together to implement development, improve the quality of life and health of the community, and a sense of ownership of the infrastructure built together. The economic impact of the KOTAKU program is an increase in community welfare and income, job creation, increased work and economic mobility of residents, and efficiency of household living needs.

Keywords: Social Impact, Economic Impact, Kota Tanpa Kumuh Program

Abstrak

Kabupaten Pandeglang memiliki luas 201,16 hektar kawasan kumuh yang tersebar di 37 lokasi di 13 kecamatan. Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kabupaten Pandeglang masih memiliki beberapa kendala dalam pelaksanaannya, yaitu kurangnya keterlibatan masyarakat yang aktif, lokasi target program tidak merata, program tidak berorientasi pada masyarakat miskin secara luas, ketidaksesuaian program yang digulirkan dengan kondisi yang dibutuhkan oleh masyarakat, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil program tidak dilakukan secara optimal. Tujuan penelitian untuk mengetahui apa saja dampak sosial dan ekonomi dari program KOTAKU di Kabupaten Pandeglang. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak sosial dari program KOTAKU adalah meningkatkan partisipasi aktif dan kesadaran masyarakat untuk bekerja sama melaksanakan pembangunan, meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat, serta rasa memiliki terhadap infrastruktur yang dibangun bersama. Dampak ekonomi dari program KOTAKU adalah peningkatan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pekerjaan dan mobilitas ekonomi warga, serta efisiensi kebutuhan hidup rumah tangga.

Kata Kunci: Dampak Sosial, Dampak Ekonomi, Program Kota Tanpa Kumuh

Pendahuluan

Kualitas dan kondisi permukiman di Indonesia sampai saat ini masih menjadi problematika yang sering muncul. Permasalahan ini akibat kurangnya sistem perencanaan dan menurunnya kualitas lingkungan permukiman, serta sistem kelembagaan penyedia sarana dan prasarana permukiman yang belum memadai, dimana secara fungsional seharusnya pemerintah wajib menyediakan sarana dan prasarana (Ramdani 2023). Permasalahan kualitas dan kondisi permukiman yang tidak layak atau kumuh masih banyak tersebar di berbagai wilayah di Indonesia khususnya di wilayah perkotaan. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan bahwa luas kawasan permukiman kumuh di Indonesia pada tahun 2014 mencapai 38.431 Ha. Hal tersebut menjadi target bagi pemerintah yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dengan arah kebijakan pembangunan wilayah perkotaan difokuskan untuk membangun kota berkelanjutan dan berdaya saing menuju masyarakat kota yang sejahtera. Sasaran pembangunan kawasan permukiman secara nasional adalah pencapaian target akses universal untuk memenuhi kebutuhan 100% akses sanitasi, 0% luasan kumuh, dan 100% akses air minum. Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya menyelenggarakan berbagai program untuk mendukung pencapaian target nasional tersebut, salah satunya yaitu program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Program KOTAKU merupakan bentuk dari program pembangunan infrastruktur di daerah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan untuk pengentasan kemiskinan. Secara umum tujuan pembangunan ekonomi daerah adalah untuk mengembangkan lapangan kerja bagi penduduk yang ada sekarang, mencapai ekonomi daerah, dan mengembangkan basis ekonomi dan kesempatan kerja beragam (Kurniawan, 2015).

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) adalah program peningkatan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. Tujuannya dapat mengurangi atau menuntaskan luas permukiman kumuh dengan cara berkolaborasi dalam penanganan kawasan kumuh dari berbagai stakeholder. Dengan harapan dapat meningkatnya kemandirian masyarakat dalam perbaikan lingkungan permukiman kumuh, terbangunnya perilaku bermukim yang bersih, sehat dan produktif bagi warga masyarakat serta terbangunnya sistem layanan pengadaan hunian

yang layak dan terjangkau bagi warga masyarakat tidak mampu di daerah yang didukung oleh lembaga keuangan yang kuat dan stabil (Cahyono dan Mustofa 2023). Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh bertujuan untuk mencegah muncul dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru serta meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat melalui Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Pendekatan kegiatan untuk penanganan kumuh dilakukan melalui kegiatan skala lingkungan dan skala kawasan.

Provinsi Banten merupakan salah satu provinsi yang memiliki wilayah kumuh di Indonesia. Luas wilayah kawasan pemukiman kumuh di provinsi Banten mencapai 1.900 Ha (Radar Banten, 2018). Kawasan kumuh tersebut tersebar di 8 kabupaten/kota. Provinsi Banten memiliki tingkat kepadatan penduduk mencapai 1.232 jiwa per kilometer persegi (BPS, 2024). Tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dan terbatasnya lahan menjadi salah satu faktor utama penyebab munculnya kawasan kumuh di wilayah Provinsi Banten.

Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu dari delapan daerah kabupaten/kota di Provinsi Banten yang memiliki kawasan pemukiman kumuh seluas 201,16 Ha terdapat di 37 lokasi yang tersebar di 13 (Tiga belas) Kecamatan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kabupaten Pandeglang Nomor 660/Kep.203-Huk/2019. Pemerintah Kabupaten Pandeglang menetapkan penanganan jalan, *drainase*, JPO dan persampahan sebagai prioritas kegiatan skala kawasan. Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kabupaten Pandeglang sudah berjalan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2022. Namun dalam pelaksanaannya masih ada beberapa permasalahan yang menghambat pencapaian program KOTAKU dan berdampak pada kurang signifikannya perubahan ekonomi dan sosial yang diharapkan. Permasalahan yang terjadi di lapangan dalam penyelenggaraan program KOTAKU yaitu pertama, kurangnya keterlibatan secara aktif masyarakat khususnya masyarakat penerima manfaat, tidak sedikit masyarakat yang belum mengetahui program KOTAKU ini. Kedua, belum meratanya lokasi sasaran program. Ketiga, belum berorientasi pada masyarakat miskin secara luas. Keempat, ketidaktepatan program yang digulirkan dengan kondisi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kelima, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil program yang tidak dilakukan

secara optimal. Berdasarkan indikasi masalah tersebut, maka rumusan masalah yaitu “Bagaimana Dampak Sosial Ekonomi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kabupaten Pandeglang?”

Kajian program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) telah banyak diteliti, salah satunya penelitian Ramdani (2023) dan Christianingrum & Djumiarti (2019) yang sama-sama membahas terkait implementasi program kota tanpa kumuh dengan lokus yang berbeda, hasilnya memberikan gambaran evaluasi pelaksanaan program kota tanpa kumuh di masing-masing wilayah yang berbeda. Kajian implementasi program KOTAKU mengkaji dengan melihat sudut pandang penghambat program yang dilaksanakan. Selanjutnya penelitian lainnya terkait kajian program KOTAKU yaitu Rahajuni, dkk (2018) melihat dampak program pada masyarakat miskin dengan pemanfaatan lingkungan kumuh untuk kegiatan ekonomi produktif. Kajian terkait dampak program KOTAKU berdasarkan aspek ekonomi dilakukan oleh Maharani, dkk (2020) didapat hasil bahwa program KOTAKU memberikan dampak positif dari aspek ekonomi yaitu peningkatan pendapatan dan pertambahan lapangan pekerjaan masyarakat. Berdasarkan pemetaan Vos Viewer didapat hasil bahwa kajian terkait program KOTAKU terkonsentrasi membahas terkait evaluasi dan implementasi dari program tersebut dan kajian-kajian program KOTAKU banyak diteliti direntang waktu tahun 2021. Sementara untuk kajian penelitian terkait dampak sosial ekonomi dari program KOTAKU khususnya di Kabupaten Pandeglang belum ada pembahasan mengenai hal tersebut. Hal ini memberikan sebuah novelty dan kebermanfaatan guna keberlanjutan program kedepan.

Tinjauan Pustaka

Dampak sosial menurut Surto Haryono (dalam Dwi P. 2015), dampak dibagi menjadi dua yaitu dampak primer dan dampak sekunder. Dampak primer adalah dampak yang langsung dirasakan oleh suatu kegiatan, sedangkan dampak sekunder adalah dampak yang tidak langsung dirasakan oleh suatu kegiatan. Fardani (2012) menyatakan bahwa dampak sosial adalah sebuah bentuk akibat atau pengaruh yang terjadi karena adanya sesuatu hal. Pengaruh yang dimaksud adalah akibat yang terjadi pada masyarakat, baik karena suatu kejadian itu mempengaruhi masyarakat atau hal lainnya didalam masyarakat.

Perubahan sosial yang terjadi di masyarakat juga menimbulkan dampak secara ekonomi, dampak ekonomi dijelaskan oleh Stynes (dalam Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2013) dikelompokkan dalam tiga indikator, (1) *direct effect* meliputi penjualan, kesempatan kerja, pendapatan pajak, dan tingkat pendapatan, (2) *indirect effect*, meliputi perubahan tingkat harga, perubahan mutu dan jumlah barang dan jasa, perubahan dalam penyediaan properti dan variasi pajak, serta perubahan sosial dan lingkungan, (3) *induced effects*, yaitu pengeluaran rumah tangga, dan peningkatan pendapatan. Selain itu dampak ekonomi juga dijelaskan oleh Cohen (dalam Dwi P, 2015) terdiri dari, (1) dampak terhadap pendapatan, (2) dampak terhadap aktivitas ekonomi, (3) dampak terhadap pengeluaran. Dari sini lebih diperjelas bahwa dampak ekonomi dijelaskan sebagai akibat dari suatu perubahan yang terjadi dilingkungan. Hal lain menurut Sinaga (dalam Setyaningsih, 2014) dampak sosial ekonomi dapat dilihat dari sisi positif dan negatif sehingga dapat lebih berimbang dalam memberikan penilaian.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian eksploratif dengan pendekatan kualitatif melihat sejauh mana dampak sosial dan ekonomi dari program KOTAKU. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Informan dipilih secara sengaja dan yang memiliki keterkaitan (*Purposive Sampling*) yaitu pihak Bappeda Kabupaten Pandeglang, pihak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, kepala desa dan petugas kelurahan/desa, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), Koordinator Program KOTAKU, Tim Pendamping Program KOTAKU, Ketua RT, dan masyarakat. Data didapat dari wawancara, observasi dan studi pustaka yang kemudian dilakukan kondensasi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap analisis data dilakukan dengan teknik analisis data interaktif menurut Miles & Huberman (2014).

Pembahasan

Dampak Sosial Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kabupaten Pandeglang

Sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 program KOTAKU sudah berjalan, namun yang menjadi daerah prioritas pada tahun 2022 dalam program KOTAKU di Kabupaten Pandeglang yaitu di Desa Teluk dengan luas penataan kawasan kumuh 10.86 Ha, Desa Labuan 3,35 Ha, dan Desa Cigondang 3,12 Ha, ketiganya berada di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang dengan luas total kawasan kumuh 17.33 Ha. Bantuan yang cukup besar diberikan melalui Kementerian Umum Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya, sebesar Rp. 17 miliar yang diberikan kepada Desa Teluk Kecamatan Labuan untuk menjalankan program tersebut.

Dengan adanya pelaksanaan program KOTAKU yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada beberapa kawasan kumuh di Kabupaten Pandeglang dengan tujuan untuk penataan dan pengurangan kawasan kumuh di lingkungan perkotaan telah memberikan dampak sosial baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Beberapa dampak sosial yang dapat dirasakan oleh masyarakat disekitar pembangunan program KOTAKU di Kabupaten Pandeglang yaitu peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, karena program KOTAKU mewajibkan dan mensyaratkan masyarakat harus terlibat secara langsung sebagai perencana, pelaksana, dan pemelihara pembangunan.

Keterlibatan masyarakat di wadah dalam komunitas BKM dan KSM. Kegiatan pembangunan infrastruktur dilakukan oleh KSM dan UPL-BKM masing-masing kelurahan. KSM amat penting perannya dalam setiap proses pembangunan. Sebelum pelaksanaan, dilakukan musyawarah untuk menyepakati jenis kegiatan infrastruktur yang akan dibangun dan pembentukan panitia kegiatan atau KSM. Saat pelaksanaan, jika terjadi masalah atau kendala maka BKM harus mengatasi dengan melakukan musyawarah bersama pihak terkendala. Setelah pembangunan, telah dilaksanakan maka KSM melaporkan kepada BKM dan BKM menyampaikan hasil kerja kepada Tim Koordinator Kota secara transparan, maka dari itu dampak sosial program KOTAKU telah membawa masyarakat secara penuh keterlibatan dalam program tersebut. Namun permasalahannya dalam pemeliharaan, masyarakat belum dapat terlibat peran sertanya,

karena pemerintah pusat maupun pemerintah daerah belum mampu melaksanakan pembangunan dan penataan program tersebut secara berkesinambungan. Partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan hasil pembangunan program KOTAKU belum berjalan dengan baik, rendahnya tingkat keasadaran masyarakat terhadap hasil pembangunan tidak dibarengi pula oleh upaya pemerintah untuk memberikan edukasi dan tindakan pemeliharaan secara berkala. Kondisi pemeliharaan terhadap fasilitas pembangunan program KOTAKU masih menghadapi kendala terkait pengelolaan dan tanggung jawab dari fasilitas yang telah dibangun tersebut.



Gambar 1 Kondisi Hasil Program KOTAKU Terlihat Tidak Terpelihara

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2024

Dampak sosial dari program KOTAKU hanya dirasa dampaknya terlihat pada saat perencanaan dan pelaksanaan program saja. Partisipasi warga dan solidaritas warga mendorong kerjasama dengan satu tujuan untuk dapat bersama-sama mebenahi kawasan kumuh, antusiasme warga sangat tinggi dalam melakukan gotong royong dan bermusyawarah, aktif terlibat dalam BKM dan KSM, namun setelah pelaksanaan program tidak memberikan dampak besar dalam perubahan sosial warga untuk dapat memelihara dan merawat lingkungan. Dampak perubahan sosialnya masih kecil, masih banyak warga yang belum sadar akan menjaga lingkungan dan membuang sampah sembarangan.

Sedangkan dalam peningkatan kualitas hidup terjadi peningkatan kualitas hidup karena adanya perbaikan infrastruktur dasar seperti tersedianya akses air bersih, sanitasi, dan jalan lingkungan telah meningkatkan kesehatan masyarakat. Warga melaporkan penurunan insiden penyakit seperti diare dan demam berdarah. Namun tetap aspek

kebersihan lingkungan harus tetap dijaga karena saat ini pantai di Desa Teluk Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang merupakan pantai terkotor di Indonesia (Pandawaragroup, 2023).

Program KOTAKU berhasil menciptakan dampak sosial positif, terutama dalam membangun rasa kepemilikan masyarakat terhadap infrastruktur yang telah dibangun. Meskipun program KOTAKU telah memberikan dampak positif, keberlanjutan program menjadi tantangan utama. Beberapa kendala, seperti keterbatasan dana operasional masyarakat dan penurunan motivasi warga setelah program selesai, perlu diatasi melalui penguatan kelembagaan lokal. Pendekatan berbasis masyarakat (*Community-Based Approach*) memberikan ruang partisipasi aktif sehingga masyarakat merasa memiliki peran penting dalam keberlanjutan program. Selain itu tantangan yang perlu diatasi dalam pelaksanaan proyek ataupun program pembangunan kedepannya yang ada di lingkungan masyarakat Kabupaten Pandeglang yaitu keterbatasan edukasi di beberapa kelompok masyarakat mengenai pengelolaan fasilitas yang telah dibangun serta ketergantungan pada bantuan eksternal dalam beberapa komunitas, yang dapat menghambat keberlanjutan program.

Dampak Ekonomi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kabupaten Pandeglang

Berdasarkan Berita Acara kesepakatan hasil perhitungan dan penetapan pengurangan luasan kumuh Kota/Kabupaten Pandeglang nomor: 900/1064-DKPP/2021, bahwa dari hasil perhitungan tersebut wilayah dengan luas kawasan kumuh terbanyak ada di Kecamatan Labuan dengan karakteristik lingkungan sebagai kawasan permukiman nelayan dan kawasan permukiman penunjang pariwisata. Tentunya kawasan kumuh di Kecamatan Labuan merupakan kawasan strategis yang apabila dilakukan penataan dan revitalisasi kawasan kumuh memberikan dampak manfaat kedepan. Maka dari itu pemerintah pusat melalui kementerian PUPR menjadikan kawasan Desa Teluk Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang menjadi kawasan prioritas dalam penataan kawasan kumuh yang ada di Kabupaten Pandeglang. Berikut data hasil penetapan kawasan kumuh oleh Dinas PKPP Kabupaten Pandeglang Tahun 2021:

Tabel 1
Penetapan Kawasan Kumuh Kabupaten Pandeglang Tahun 2021

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Luas Kumuh (Ha)	Capaian Pengurangan Luasan Kumuh 2021 (Ha)	Sisa Luasan Kumuh (Ha)
1	Pandeglang	Pandeglang	20,09	13,06	7,03
2	Pandeglang	Kabayan	27,52	7,50	20,02
3	Pandeglang	Kadomas	16,81	11,07	5,74
4	Pandeglang	Babakan Kalanganyar	15,12	0,00	15,12
5	Labuan	Teluk	10,20	9,20	1,00
6	Labuan	Cigondang	15,10	3,80	11,30
7	Labuan	Caringin	22,30	22,30	0,00
8	Labuan	Kalanganyar	7,54	7,54	0,00
9	Labuan	Labuan	3,19	3,19	0,00
10	Labuan	Banyumekar	13,85	2,65	11,20
11	Labuan	Banyubiru	7,53	7,53	0,00
12	Labuan	Rancateurep	20,51	4,08	16,44
13	Labuan	Sukamaju	8,72	0,00	8,72
14	Sukarame	Sukarame	10,88	10,88	0,00
Jumlah Luas (Ha)			199,36	97,61	96,57

Sumber: Dinas PKPP Kabupaten Pandeglang, 2024

Dari sekian banyaknya luas kawasan kumuh yang ada di Kabupaten Pandeglang pada umumnya terdapat di Kecamatan Labuan. Kawasan Kecamatan Labuan merupakan kawasan pesisir yang notabene masyarakatnya sebagian besar bermatapencaharian sebagai nelayan dan wiraswasta. Dengan adanya program KOTAKU di Kecamatan Labuan menyasar kawasan-kawasan strategis yang dapat dikembangkan dan memiliki peningkatan dampak ekonomi, salah satunya Desa Teluk Kecamatan Labuan.

Melalui program KOTAKU yang sudah dilaksanakan pada tahun 2021 di Desa Teluk Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang tentunya telah memberikan dampak positif terhadap perubahan ekonomi warga disekitar kawasan pembangunan revitalisasi tersebut. Dampak ekonomi menurut Cohen (dalam Dwi P, 2015) dijelaskan sebagai akibat dari suatu perubahan yang terjadi di lingkungan. Dengan adanya pembangunan kawasan KOTAKU di Desa Teluk Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang memberikan perubahan menjadi kawasan kuliner dan UMKM olahan laut, banyak warga yang berdatangan untuk berwisata di pinggir pantai dengan fasilitas pembangunan yang nyaman dan yang telah disediakan dari program KOTAKU sehingga berdampak pada pendapatan dan usaha warga di sekitar Desa Teluk dan menjadikan Desa Teluk menjadi

sentra kuliner olahan laut di Kabupaten Pandeglang dengan ciri makanan khasnya yaitu bubur sop. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Octavia (2022) bahwa salah satu variabel ekonomi untuk melihat kesejahteraan akibat pembangunan ekonomi dan sosial adalah peningkatan pendapatan masyarakat.

Tabel 2
Mata Pencaharian Pokok Di Desa Teluk Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang

Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan
Buruh Tani	10 Orang	3 Orang
Nelayan	2222 Orang	0 Orang
Dokter Swasta	1 Orang	0 Orang
Bidan Swasta	0 Orang	5 Orang
Polri	14 Orang	0 Orang
Guru Swasta	18 Orang	16 Orang
Dosen Swasta	3 Orang	0 Orang
Karyawan Perusahaan Swasta	32 Orang	200 Orang
Wiraswasta	1000 Orang	204 Orang
Ibu Rumah Tangga	0 Orang	3105 Orang
Perangkat Desa	168 Orang	71 Orang
Buruh Harian Lepas	350 Orang	42 Orang
Karyawan Honorar	9 Orang	30 Orang
Anggota Legislatif	1 Orang	0 Orang
Jumlah Total Penduduk	7.504 Orang	

Sumber: Potensi Prodeskel Desa Teluk Terbaru, 2023

Selain itu dampak ekonomi lainnya dari program KOTAKU yang telah dilaksanakan di Kabupaten Pandeglang yaitu berdampak pada efisiensi biaya mobilitas kerja bagi warga sekitar. Seperti di Desa Teluk Kecamatan Labuan yang dibangun jembatan penghubung antara kawasan pelabuhan dengan tempat pelelangan ikan serta jalan pedestrian bagi aktivitas warga dan para wisatawan. UMKM lokal di wilayah program mengalami peningkatan pendapatan berkat kemudahan distribusi barang dan akses pasar.

Dampak ekonomi lainnya yang didapat oleh warga sekitar program yaitu menciptakan lapangan kerja baru seperti masyarakat ikut terlibat aktif dalam membuka peluang usaha kuliner dan usaha lainnya akibat banyaknya warga yang berdatangan untuk berwisata di sekitar kawasan pantai Desa Teluk Kecamatan Labuan. Selain itu dampak ekonomi bagi warga dengan adanya program KOTAKU yang mampu membangun dan menyediakan sumber air bersih dan juga MCK yaitu memberikan kemudahan akses air

bersih dan fasilitas sanitasi yang memadai sehingga biaya rumah tangga untuk kebutuhan air dan kesehatan berkurang secara signifikan. Berikut gambar Kawasan Desa Teluk Kecamatan Labuan yang telah dilakukan revitalisasi oleh program KOTAKU.



Gambar 2 Hasil Pembangunan Program KOTAKU di Desa Teluk Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2024

Program KOTAKU yang telah dilaksanakan di Kabupaten Pandeglang menunjukkan bahwa perbaikan infrastruktur memiliki korelasi langsung dengan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat. Dampak positif seperti penurunan biaya hidup, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, serta peningkatan mobilitas ekonomi menjadi bukti keberhasilan dari program KOTAKU ini. Namun, tetap masih adanya beberapa kendala yang terjadi di lapangan, seperti memunculkan kesenjangan distribusi manfaat ekonomi antara wilayah yang lebih strategis dan wilayah yang lebih terpencil, belum optimalnya pelibatan sektor swasta dalam mendukung keberlanjutan dampak ekonomi program, serta tanggungjawab pemeliharaan dan keberlanjutan program yang tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah setempat.

Kesimpulan

Program KOTAKU di Kabupaten Pandeglang telah memberikan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Salah satunya dampak sosial dari program KOTAKU yang telah dilaksanakan di Kabupaten Pandeglang yaitu kepekaan dan kesadaran masyarakat untuk dapat bekerjasama dalam melakukan kegiatan pembangunan suatu kawasan kumuh, terjadi peningkatan kualitas hidup karena adanya perbaikan infrastruktur dasar seperti tersedianya akses air bersih, sanitasi, dan jalan lingkungan telah meningkatkan kesehatan masyarakat, serta dampak sosial pada masyarakat yaitu membangun rasa kepemilikan masyarakat terhadap infrastruktur yang telah dibangun. Selain dampak sosial

dari program KOTAKU, masyarakat merasakan dampak ekonomi dari program KOTAKU yang telah dibangun yaitu peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan pekerjaan karena masyarakat dapat andil sebagai pelaku usaha langsung dalam melakukan kegiatan UMKM sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat, efisiensi biaya rumah tangga dan mobilitas kerja bagi warga sekitar, serta berdampak pada peningkatan mobilitas ekonomi warga. Implikasi dari penelitian ini yaitu pemerintah daerah dan masyarakat agar bertanggungjawab dan sadar terhadap pemeliharaan hasil pembangunan program KOTAKU, serta mampu bekerjasama secara luas dengan pemangku kepentingan lainnya untuk keberlanjutan program agar dapat terus dilaksanakan dan ditingkatkan dengan lebih baik.

Daftar Pustaka

- BPS. 2024. *Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (jiwa/km²), 2023-2024*. Serang: BPS
- Cahyono, Ananto Hernandi Eko, dan Amirul Mustofa, 2003. "Evaluasi Dampak Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Sebagai Penanganan Kumuh Di Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun." *SMIA* 1, 2 (2003), pp. 161-168.
- Christianingrum, S. I., & Djumiarti, T, 2019. "Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh Di Kecamatan Semarang Timur." *Journal of Public Policy and Management Review*, 8 (2), pp. 1-17.
- Dwi P., Rahmat, 2015. *Dampak Sosial Ekonomi Dan Lingkungan Penambangan Batubara Ilegal Di Desa Tanjung Lalang Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim*. Palembang: Jurusan Sosiologi, Fakultas Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya
- Fardani, Andi. 2012. *Dampak Sosial Keberadaan Pt Vale Indonesia Tbk Terhadap Kehidupan Masyarakat (Studi Kasus Sorowako Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur)*. Makassar: Universitas Hasanuddin: Jurusan Sosiologi FISIP
- Kurniawan, Wawan. "Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Pariwisata Umbul Sidomukti Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang." *Economics Development Analysis Journal* , 4 (2015), pp. 443-451.
- Maharani, D. J., Partiwi, N. N., & Puryanti, V, 2020. "Dampak Program Kota Tanpa Kumuh Terhadap Aspek Ekonomi Masyarakat Di Kota Pontianak (Studi Kasus Kecamatan Pontianak Selatan)." *JeLAST : Jurnal PWK, Laut, Sipil, Tambang*
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.)*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications

- Octavia, Rovi. 2022. *Evaluasi Dampak Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau
- Pandawaragroup. 2023. "Pandawaragroup." *Instagram*. Tersedia di : <https://www.instagram.com/reel/CsgfDKyv9NM/?igsh=ZXBhOGw4YXFqZ2V1> [diakses 25 November 2024]
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2013. *Analisis Dampak Sosial-Ekonomi Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Tanjung Lesung Provinsi Banten*. Serang: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- Rahajuni, D., Suprpto, Lestari, S., & Badriah, L. S. 2018. "Dampak Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Pada Masyarakat Miskin Di Kabupaten Banyumas." *Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan VIII*, pp. 118-127.
- Ramdani, A. Ramdani, A. 2023. *Evaluasi Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Desa Teluk Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang*. Skripsi, Serang: Eprints.untirta.ac.id
- Radar Banten, 2018. "Kawasan Permukiman Kumuh se-Banten Capai 1.900 Hektare." *Radar Banten*. Tersedia di: <https://www.radarbanten.co.id/2018/11/08/kawasan-permukiman-kumuh-se-banten-capai-1-900-hektare/> [Diakses tanggal 25 November 2024]
- Setyaningsih, Ayu. 2014. *Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pasar Satwa Kasus Pasar Satwa Dan Tanaman Hias Yogyakarta (Pasty)*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Yogyakarta: Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta